



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DI SMAN 1 WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

Dona Amalia Wardana
212020100020

Administrasi Publik

Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



[universitas
muhammadiyah
sidoarjo](https://www.facebook.com/universitasmuhammadiyahsidoarjo)



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan KIP di SMAN 1 Wonoayu menurut empat faktor teori implementasi kebijakan Warwic. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian program KIP di SMAN 1 Wonoayu dilihat melalui teori implementasi kebijakan Warwic, yaitu (1) kemampuan organisasi, berupa mengadakan pelatihan secara rutin untuk staff tentang prosedur KIP, melakukan pengembangan keahlian staff, dan menerapkan teknologi serta infrastruktur yang baik untuk pengelolaan KIP; (2) informasi, berupa melakukan verifikasi data penerima KIP dari pemerintah pusat; (3) dukungan, berupa mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yaitu bimbingan dan bantuan teknis terkait implementasi KIP, serta melibatkan orang tua dan komunitas lokal untuk mendukung moral dan materiil siswa KIP; dan (4) Pembagian potensi, berupa melakukan sosialisasi tentang prosedur pencairan dan berkomunikasi dengan pihak terkait.

Keywords: Kartu Indonesia Pintar; SMAN 1 Wonoayu; Implementasi Kebijakan

Pendahuluan

Kartu Indonesia Pintar (KIP) kartu yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu sebagai bentuk bantuan pendidikan dari pemerintah. Program ini merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu program pemerintah untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pengertian PIP juga tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, bahwa Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk membiayai pendidikan. Melalui KIP siswa dari keluarga miskin mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK.

SMAN 1 Wonoayu merupakan salah satu sekolah yang telah berhasil menerapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan tujuan untuk meringankan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti tidak tepatnya sasaran penerima bantuan dan keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada siswa yang membutuhkan. Pelaksanaan kebijakan ini juga didukung oleh beberapa kementerian dan lembaga, namun keberhasilan tetap sangat tergantung pada akurasi data, sosialisasi yang memadai, serta koordinasi antar instansi.

Pendahuluan

SMAN 1 Wonoayu merupakan salah satu sekolah yang telah berhasil menerapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan tujuan untuk meringankan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti tidak tepatnya sasaran penerima bantuan dan keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada siswa yang membutuhkan. Pelaksanaan kebijakan ini juga didukung oleh beberapa kementerian dan lembaga, namun keberhasilan tetap sangat tergantung pada akurasi data, sosialisasi yang memadai, serta koordinasi antar instansi.



Pendahuluan

Tahun	Kelas	Siswa yang mengajukan KIP	Siswa yang menerima KIP
2022	11	82	53
2022	12	82	50
2023	11	107	72
2023	12	107	90
2024	11	48	45
2024	12	48	40

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa Siswa Kelas 10 dari SMAN 1 Wonoayu seharusnya menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) setiap tahun dengan jadwal pencairan yang telah ditetapkan. Namun, Siswa hanya menerimanya dua kali dalam tiga tahun, Terdapat beberapa siswa telah mengajukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, tidak mendapatkan bantuan tersebut, ada siswa yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap menerima bantuan KIP. Karena tidak akuratan ini distribusi bantuan menjadi tidak adil dan siswa yang paling membutuhkan tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima bantuan. Terkait permasalahan lain ada masalah dengan pencairan dana KIP sering kali menjadi keluhan para siswa. Salah satu penyebab utama keterlambatan ini adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang prosedur pencairan dana oleh sekolah dan pemerintah, sehingga banyak siswa atau orang tua tidak tahu proses waktu atau cara pencairan dana yang tepat. Kelemahan ini akan berdampak pada program dalam mencapai tujuannya untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam pendataan dan sosialisasi terkait pencairan dana KIP agar program ini dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa yang Membutuhkan.

Penelitian Terdahulu

Larasati, Ajeng Diah, dkk. (2022) “Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) di Universitas Diponegoro”

Temuan penelitian menemukan bahwa implementasi KIP-Kuliah di Universitas Diponegoro menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal transparansi informasi. Para mahasiswa penerima merasa kurang memperoleh informasi yang jelas dari pihak pengelola, sehingga muncul masalah dalam memahami prosedur, mengalami keterlambatan pencairan dana, serta menghadapi birokrasi kampus yang berlapis dan menyulitkan akses beasiswa secara optimal.

Harlina, Erli, Heru Purnawan, dan Evsa Wulan Suri (2023) “Evaluasi Pelaksanaan KIP Kuliah Tahun 2022 (Studi di Universitas Bengkulu)”

Temuan penelitian yaitu ditemukan bahwa beberapa mahasiswa dari keluarga mampu tetap memperoleh beasiswa KIP melalui koneksi orang dalam, serta penggunaan dana beasiswa untuk keperluan konsumtif dan gaya hidup hedonistik. Hal ini menunjukkan kegagalan program dalam mencapai tujuan utama membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Jumanah dan Hilda Rosita (2022) “Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan”

Temuan penelitian yaitu terdapat permasalahan yang muncul meliputi ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan pencairan dana, proses verifikasi kartu yang lambat, kurangnya sosialisasi dari pihak penyelenggara, serta rendahnya kesadaran orang tua terhadap tujuan bantuan pendidikan. Semua kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya program dalam mendorong pemerataan akses pendidikan.



Gap Masalah Penelitian dan Teori

Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Data penerima KIP tidak akurat sehingga ada siswa yang berhak mendapatkan tetapi tidak mendapatkan KIP atau sebaliknya ada yang mendapatkan tetapi sebenarnya tidak memenuhi syarat.
2. Pencairan dana KIP sering kali menjadi keluhan di mana siswa mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah kurangnya sosialisasi dalam proses pencairan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di SMAN 1 Wonoayu Kabupaten Sidoarjo”** Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo, penulis menggunakan empat faktor dari Teori Implementasi kebijakan Warwic Tahir. Empat faktor tersebut terdiri dari (1) kemampuan organisasi, (2) informasi, (3) dukungan, dan (4) pembagian potensi.

Metode Penelitian

- **JENIS PENELITIAN**

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif

- **FOKUS PENELITIAN**

Implementasi Program KIP di SMAN 1 Wonoayu menggunakan teori implementasi kebijakan Warwic Tahir yang terdiri dari empat faktor: kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

- **LOKASI PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di SMAN 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

- **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

- Observasi Lapangan
- Wawancara
- Dokumentasi

- **SUMBER DATA**

- Data Primer
- Data Sekunder

- **TEKNIK PENENTUAN INFORMAN**

Purposive Sampling (Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan)

- **INFORMAN PENELITIAN**

- Kepala Sekolah SMAN 1 Wonoayu
- Koordinator KIP SMAN 1 Wonoayu



Hasil dan Pembahasan

Kemampuan Organisasi

Kemampuan organisasi dalam implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMAN 1 Wonoayu terbilang cukup memadai. Sekolah secara aktif melakukan pelatihan rutin bagi staf dan guru terkait prosedur dan teknis pengelolaan KIP. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, seperti yang disarankan oleh Warwic Tahir bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kekuatan internal organisasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan infrastruktur juga mendukung kelancaran proses verifikasi data serta pencairan bantuan KIP. Ketersediaan komputer dan akses internet menjadi faktor pendukung utama dalam proses digitalisasi administrasi bantuan. Tidak ditemukan permasalahan yang signifikan dalam indikator ini, justru sekolah menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem yang efisien untuk mendukung pelaksanaan program KIP.



Hasil dan Pembahasan

Informasi

Permasalahan cukup menonjol muncul pada aspek informasi. Proses penyaluran bantuan KIP masih diwarnai dengan ketidaktepatan data, di mana beberapa siswa yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat, sementara siswa yang tidak memenuhi syarat malah terdaftar sebagai penerima. Hal ini menandakan lemahnya verifikasi dan pembaruan data, yang menyebabkan distribusi bantuan tidak tepat sasaran. Menurut teori Warwic, informasi merupakan elemen vital dalam proses implementasi kebijakan karena menyangkut akurasi, kelengkapan, dan keterkinian data yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, sekolah masih bergantung pada data pusat yang kadang tidak mencerminkan realita di lapangan. Ketidaksesuaian data berdampak pada ketidakadilan dalam pemberian bantuan dan ketidakpuasan dari para siswa dan orang tua.

Tahun	Siswa Mengajukan	Siswa Menerima
2024	214	162

Hasil dan Pembahasan

Dukungan

Faktor dukungan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dimana SMAN 1 Wonoayu mendapatkan bimbingan dan bantuan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, yang sangat membantu dalam memahami mekanisme dan aturan pelaksanaan KIP. Selain itu, partisipasi masyarakat, khususnya orang tua siswa dan komunitas lokal, juga turut memberikan dukungan moral dan materiil kepada siswa penerima bantuan. Ini menunjukkan bahwa lingkungan sekitar sekolah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelangsungan program. Sesuai dengan teori Warwic, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aktor utama pelaksana, tetapi juga dukungan dari pemangku kepentingan eksternal. Dalam hal ini, kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan menjadi fondasi yang kuat dalam pelaksanaan program KIP di sekolah tersebut.



Hasil dan Pembahasan

Pembagian Potensi

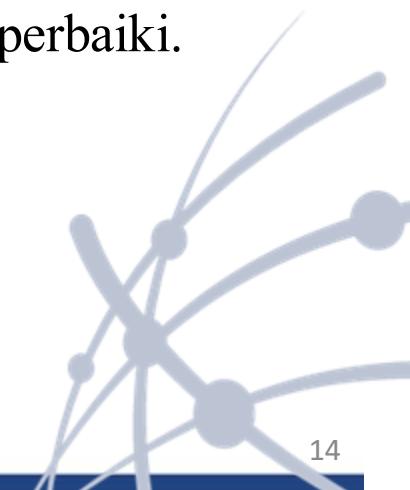
Faktor pembagian potensi masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu masalah utama adalah keterlambatan pencairan dana yang sering kali terjadi, bahkan dalam beberapa kasus mencapai dua hingga tiga bulan dari waktu yang dijadwalkan. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi kepada siswa dan orang tua mengenai prosedur pencairan, serta belum optimalnya koordinasi antara pihak sekolah dengan instansi terkait. Dalam teori Warwic, pembagian potensi mencakup kejelasan dalam alokasi sumber daya dan tanggung jawab antar pihak yang terlibat. Di SMAN 1 Wonoayu, kurangnya kejelasan ini menyebabkan kebingungan dan keluhan dari penerima bantuan. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah berupaya memperkuat komunikasi dan memperjelas prosedur melalui penyuluhan serta pertemuan dengan orang tua siswa. Namun, langkah-langkah ini masih perlu diperluas dan disistematisasi agar pelaksanaan program menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Hasil dan Pembahasan

Aspek	Masalah	Dampak	Solusi
Akurasi Data Penerima	Data penerima KIP tidak akurat, beberapa penerima tidak layak	Siswa yang berhak tidak mendapatkan bantuan	Penguatan sistem verifikasi data dan pengumpulan informasi
Sosialisasi	Kurangnya sosialisasi tentang proses pencairan KIP	Kebingungan di kalangan orang tua siswa	Mengadakan pertemuan rutin dan penyuluhan kepada masyarakat
Koordinasi Antar Instansi	Kurangnya koordinasi antara sekolah dan instansi terkait	Keterlambatan dalam proses pencairan dana	Memperjelas alur komunikasi dan tanggung jawab setiap pihak
Dukungan Sumber Daya	Keterbatasan sumber daya untuk mendukung pengawasan	Terhambatnya proses pencairan dana dan pengelolaan KIP	Alokasi sumber daya manusia yang memadai untuk pengawasan
Pengelolaan Dana	Keterlambatan pencairan dana KIP	Penerima merasa dirugikan dan mengajukan keluhan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMAN 1 Wonoayu menunjukkan bahwa dari empat faktor dalam Teori Warwic Tahir, yaitu (1) **kemampuan organisasi**, sekolah sudah cukup baik melalui pelatihan rutin bagi staf serta dukungan infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai. (2) **dukungan**, pelaksanaan program mendapat respon positif dari Dinas Pendidikan, orang tua, dan komunitas lokal yang secara aktif terlibat dalam mendukung keberhasilan program. (3) **informasi**, masih ditemukan kendala dalam akurasi data penerima yang menyebabkan tidak tepatnya sasaran bantuan. Sekolah telah melakukan verifikasi data secara berkala dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait. (4) **pembagian potensi**, masih terjadi hambatan koordinasi dan keterlambatan pencairan dana. Sekolah telah melakukan sosialisasi rutin kepada siswa dan orang tua mengenai prosedur pencairan serta peningkatan komunikasi antar lembaga. Meski sudah berjalan baik, beberapa aspek implementasi KIP masih perlu ada yang diperbaiki.



TERIMA KASIH

